

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua negara di dunia ingin menjadi negara yang sejahtera. Dimana negara mampu melindungi rakyatnya dari ancaman bahaya yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta senantiasa menciptakan rasa aman dan tenteram bagi rakyatnya. Begitu juga dengan negara Thailand, negara ini merupakan negara yang belum pernah dijajah oleh bangsa lain. Kerajaan Thailand mampu melindungi rakyatnya dari bahaya penjajahan negara asing. Meskipun demikian, negara Thailand tidak luput dari permasalahan konflik dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu, Muslim Melayu di bagian Selatan. Konflik yang terjadi telah berlangsung sejak awal tahun 1990-an dan hingga kini masih belum menemukan titik temu.

Mengutip dari Harun Sa-Lae dengan judul “Konflik Manifest Berbasis Pelanggaran HAM atara Negara dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani, di Daerah Patani (Thailand Selatan)” bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh perintah kerajaan Thailand terhadap masyarakat muslim di Provinsi Patani di Thailand Selatan pada tahun 2003-2013. Tercatat sebanyak 1.850 kali kasus kekerasan pada tahun 2003, pada tahun 2004 berlaku kekerasan sebanyak 2.174 kali, tahun 2005 sebanyak 1.850 kali, tahun 2007 sebanyak 821 kali, tahun 2008 sebanyak 1.031 kali, tahun 2008 sebanyak 952 kali, tahun 2009 sebanyak 906 kali, tahun 2010 sebanyak 1.184 kali, tahun 2011 sebanyak 1.298 kali, tahun 2012 sebanyak 1.298 kali, tahun 2013 sebanyak 793 kali kekerasan. Dari konflik kekerasan tersebut total korban yang meninggal sebanyak 6.286 orang, dan 11.366 orang cedera dari tahun 2003-2013.¹Pergolakan yang muncul di Patani pada tahun 2004 lalu, merupakan salah satu rentetan peristiwa konflik yang terjadi antara orang Melayu Islam

¹ Harun Sa-Lae, *Konflik Manifest berbasis pelanggaran HAM antara Negara dengan Rakyat Minoritas Melayu Muslim Patani di Daerah Patani (Thailand Selatan)*, (Malang: Tesis Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hlm. 15

Patani dengan kerajaan Thailand yang bermula sejak ratusan tahun dahulu. Sepanjang tempoh itu, berbagai perubahan dalam pendekatan penyelesaian konflik dilakukan oleh kerajaan Thailand khususnya antara era pemerintahan Raja Chulalongkhon dan pemerintahan sekarang yang diketuai oleh Abihisit Vijajiva. Berbagai pendekatan telah digunakan, tetapi masih juga belum membawa kejayaan dan keamana di Patani. Justru sebaliknya, keadaan ini malah berujung konflik di daerah tersebut. Hal ini dilihat dari semakin meruncing dan tidak terkawal disamping menimbulkan isu-isu baru.²

Hingga saat ini konflik semakin membara, insiden kekerasan semakin tinggi sampai sekarang, menurut statistic dalam laporan media Thailand Inranews mengatakan bahwa sejak tahun 2004-2017 jumlah korban mati tercaoi 7,666 orang dan 13,155 orang luka-luka. Disinilah peran media alternative menjadi peran yang sangat penting untuk memberikan informasi yang detil dan akurat mengenai apa yang terjadi di Patani (Thailand Selatan), selama ini telah banyak kehilangan terhadap masyarakat setempat.³

Uraian di atas menyadarkan kita, betapa besar kekuasaan media massa mengkonstruksi realitas. Kita setiap hari disuruhi berita hasil konstruksi media. Berita hasil pemaknaan media atas dunia. Kita mengetahui dunia hanya lewat jendela atau frame yang dipasang media. Padahal, jendela itu mungkin sempit, berjuruju, dan di depannya ada pohon penghalang. Anehnya, dunia yang kita lihat sering kita anggap sebagai dunia yang sebenarnya. Kita sering berdiskusi, berargumentasi, berdebat, bahkan bertengkar berdasarkan pemahaman kita terhadap dunia hasil konstruksi media.⁴

Melawan penindasan lewat media dengan peran “Lembaga Media Warta Patani” disingkat dengan “Wartani”, Wartani didirikan sekelompok anak muda Patani pada 2012 lalu, untuk mengimbangi media lokal, terutama yang ada di Bangkok, ibu Kota Thailand, lantaran dianggap tidak berpihak pada

² Che Mohd Aziz Yaacob, “*Isu Dan Penyelesaian: Konflik Pemisah Di Selatan Thailand*”, Malaysian Journal of History, Politics, & Strategic Studies, Vol. 38 (1) (2011): 13 - 34

³ Mamang Faisol, “*Peran Civil Society Organization Dalam Proses Perdamaian Di Patani*”, UIN Sunan Kalijaga, 2017, Hlm 249.

⁴ *Ibid*, Hlm 252.

masyarakat Patani yang hak-haknya dirampas, dan diperlakukan tidak adil. Media lokal telah dinilai cenderung mengakomodir kepentingan pemerintah Thailand. Dengan perampasan hak-hak dasar masyarakat Melayu Patani oleh pemerintah Thailand memicu semangat perlawanan pemuda Patani terhadap penguasa.

Mesti diakui juga bahwa konflik Patani, tanpa media massa, akan hambar rasanya. Ia tidak akan memiliki legitimasi, bahkan hanya menjadi sebuah berita kecil tanpa arti, yang amat terbatas skop pendengarnya. Jangkauan liputan dan penyebaran yang melintas batas negara serta didukung kecanggihan teknologi dengan sumber daya yang profesional sebuah berita mampu menembus berbagai dimensi manusia dan dunia. Media juga mempertajam efek psikologisnya, jauh melebihi apa yang bisa dicapai oleh konflik itu sendiri.

Disinilah media massa memainkan peran terbesarnya dalam *acceleration* sebuah topik menuju kesabaran, kepentingan dan intensitas masyarakat yang lebih tinggi dan lebih luas lagi. Konflik Patani yang sudah berlangsung lama juga dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Sehingga mendapat atensi dari luar negeri. Peran media dalam konflik Patani makin terasa eksistensinya. Artinya jauh sebelum peran terjadi di Patani, perang itu secara simbolik telah hadir ditengah-tengah masyarakat. Berbagai cara dilakukan agar masyarakat Melayu Patani mendapat hak-haknya. Salah satunya kampanye lewat media baik online dengan aplikasi facebook, line, maupun youtube.

Para pemuda Patani mendirikan Wartani (www.wartani.com) pada 2012, lembaga yang bergerak dibidang media, informasi dan teknologi untuk menyampaikan ketidakadilan yang dialami masyarakat Melayu Patani ke dunia luar. Kemunculan Wartani dengan tujuan membina para anak muda di kampung-kampung untuk menyampaikan informasi mengenai isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Melalui pelatihan yang dilakukan wartani, muncullah anak-anak muda patani yang awalnya tidak pahami masalah media

menjadi tahu akan kerja-kerja media. Ada tiga program Wartawani yakni artikel, video, dan grafik-design.⁵

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat menjadikan masyarakat dunia telah bergerak dan beralih dari era tradisional, industrialisasi ke era informasi yang berujung pada hadirnya masyarakat informasi (*information society*). Rogers menyatakan bahwa masyarakat informasi adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan (Rogers, 1991:11).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari jalinan relasi sosial, dimana manusia selalu akan mengadakan kontak sosial yaitu selalu berhubungan dengan orang lain. Bahkan sebahagian besar dari waktu kita gunakan untuk berkomunikasi. Mengingat kuantitas berkomunikasi yang dilakukan dan jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia. Tidak ada suatu yang lebih penting bagi sebagian besar orang selain berinteraksi dengan orang lain.⁶

Dunia telah beralih dari era informasi revolusioner yang kemudian melahirkan informasi society (masyarakat informasi). demam globalisasi melanda hampir di setiap negara bahkan sampai ke level desa terkecil sekalipun, tidak terkecuali sejumlah desa di wilayah Indonesia. Dalam aktivitas kehidupan masyarakat informasi, teknologi dan medium komunikasinya dianggap merupakan aspek paling vital dalam menuntaskan dan memudahkan berbagai persoalan kehidupan. Namun, menjadi penting pula diketahui bahwa dalam era kecanggihan teknologi, masyarakat perlu memahami dengan baik bagaimana penggunaan teknologi secara optimal, efisien, dan berdaya guna.

⁵ *Ibid.*, Hlm 253

⁶ Rayan A. Lompoliu, Yuriwaty Pasoreh, e-journal, *Paran Komunikasi Dalam Menyelesaikan Konflik Diantara Remaja Di Desa Sedangkan Kecamatan Kakas* "Acta Diurna" Volume IV. No.3. Tahun 2015. Hlm 1

Selain itu, perlu pula pemahaman yang jelas terkait muatan (content) dari sebuah informasi yang disampaikan sejumlah media, khususnya media online.⁷

Media massa juga tidak kalah penting memiliki peran besar dalam mengembangkan dan menyebar luaskan wacana dan peristiwa internasional. Isu, wacana dan peristiwa yang berkembang atau terjadi di sebuah negara dengan cepat akan menyebar ke negara lain berkat pemberitaan media massa. Peristiwa yang bisa diangkat sebagai contoh adalah maraknya aksi gerakan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia pada akhir 1980-an dan terutama pada tahun 1990-an. Berkembangnya aksi-aksi gerakan mahasiswa Indonesia tersebut tidak lepas dari peran media massa dalam memberitakan kebangkitan gerakan mahasiswa di Philipina yang menuntut Ferdinand Marcos mundur dari jabatannya pada tahun 1986 dan aksi gerakan mahasiswa Cina di Lapangan Tiananmen Cina pada tahun 1989 menentang pemerintahan sosialis dan menuntut pemerintahan yang demokratis. Peristiwa-peristiwa dan isu-isu yang diangkat oleh gerakan mahasiswa di dua negara tersebut yang kemudian disebarluaskan melalui pemberitaan media massa telah mendorong para aktivis mahasiswa di Indonesia untuk melakukan aksi serupa.⁸

Wartawan atau jurnalis merupakan orang yang bertugas atau bekerja untuk mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan mengajikannya secara cepat kepada khalayak luas yang dapat dilakukan melalui media cetak atau media elektronik. Menurut Eriyanto (2002:28), dalam melakukan tugasnya, wartawan sebetulnya bukan hanya mengambil realitas yang sebenarnya, tapi juga membentuk berita: ia menguraikan, mengurutkan, mengonstruksi peristiwa demi peristiwa, sumber demi sumber, serta membentuk citra dan berita tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara

⁷ Amar Ahmad, '*Perkembangan Media Online dan Fenomina Disinformasi*', Jurnal Pekommas, Vol. 16 No. 3, Desember 2013:177

⁸ Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 7, Nomor 3, September-Desember 2009, hlm 229

dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pers tersebut, dapat dirangkum menjadi tiga kegiatan yang umumnya dilakukan oleh wartawan di lapangan, yaitu kegiatan mencari berita (news hunting) yang merujuk pada kenyataan bahwa wartawan harus mengejar (memburu) sumber berita agar mendapatkan hasil yang diharapkan, lalu kegiatan pengumpulan berita (news gathering), merujuk pada pekerjaan wartawan yang hanya mengumpulkan bahan berita dari berbagai sumber yang tersedia sampai kepada kegiatan membuat berita (news making).

Ukuran profesionalisme wartawan terletak pada ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Selagi berpegang teguh pada KEJ, tidak satu pehakupun bias menggugat hasil karya jurnalistik yang dibuat wartawan, selain itu, wartawan secara profesi juga sudah semestinya berpegang pada undang-undang yang secara khusus berlaku untuknya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Wartawan juga perlu bergabung dengan organisasi formal terkait profesinya, seperti PWI dan AJI, untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam profesi kewartawanan (Ershad et al., 2012:9).

Selain ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, seorang wartawan juga harus memperhatikan nilai-nilai local yang berlaku pada masyarakat di sekitarnya. Hal ini dikarenakan profesi wartawan memiliki mobillitas dan dinamika yang tinggi. Wartawan harus aktif melakukan “personal contact” atau hubungannya dengan orang lain. Wartawan menjalin hubungan dengan semua orang dari berbagai latar belakang dan status social, khususnya narasumber yang menjadi mitra wartawan.⁹

Thailand memimpikan kebebasan pers selayaknya di Indonesia. Kebebasan pers di Indonesia lahir sejak Orde Baru tumbang pada 1998.

⁹ Marzuki, Suparman. 2008. *Konflik Tanah di Indonesia*. Dalam workshop hasil penelitian di tiga wilayah di Lombok. h. 1

Semenjak itu, wartawan dapat memperoleh dan menyampaikan informasi secara leluasa.

Di sisi lain, pers di 'Negeri Gajah Putih' merasa terkekang setelah terpilihnya Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-ocha. Mereka ingin kebebasan pers di kepemimpinan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra di 2006 muncul kembali.

"Mereka melihat bahwa kita beruntung dan perlu dijaga ada kebebasan pers, ini terus dipertahankan, mereka juga melihat perbandingan itu," kata Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK saat menjamu Dewan Pers Thailand di Resto Kembang Goela, Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2018.

First Vice-Chairperson The National Press Council of Thailand (NPCT) Nattaya Chotchotiros mengatakan industri pers di Indonesia sangat berkembang dibanding dengan Thailand. "Dewan Pers di Indonesia mengedepankan kebebasan media, sedangkan Thailand mengedepankan masalah-masalah etika dan regulasi."

Chotchotiros menilai Dewan Pers penting untuk mengembangkan dunia media. Dalam lingkup Asia Tenggara, hanya ada tiga negara yang memiliki Dewan Pers. "Indonesia, Thailand dan Myanmar, ada tujuh negara yang tidak punya Dewan Pers Nasional," imbuh dia.¹⁰

Dewan Pers pada 20-23 Desember 2009 melakukan kunjungan ke Thailand dalam rangka melakukan kerjasama di bidang pers dan menguatkan peran Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan dan mengawasi pelaksanaan etika jurnalistik.

Selama di Thailand, delegasi Dewan Pers bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Abhisit Vejjajiva, Anggota National Press Council of Thailand (NPCT) atau Dewan Pers Thailand, Thai Broadcast News Council, dan Thai Journalists Association and Thai Broadcast Journalists Association. Dewan Pers juga berkunjung ke kantor redaksi *Bangkok Post*, *Thairath*

¹⁰Fachri Audhia Hafiez, *Literasi Digital*, dalam <https://www.medcom.id/nasional/politik/Zke0Aqqb-thailand-mimpikan-kebebasan-pers-seperti-indonesia>

Newspaper, Thai Public Broadcasting, dan pengurus Media Monitoring Thailand.

Berikut ini dua catatan aja dari pertemuan Dewan Pers dengan beberapa pejabat, tokoh, dan lembaga selama di Thailand:

Catatan pertama: Perdana Menteri Kerajaan Thailand, Abhisit Vejjajiva, saat bertemu delegasi Dewan Pers menyatakan, sepanjang tahun 2009 Parlemen bersama masyarakat pers di Thailand sedang membahas RUU tentang perlindungan profesi jurnalis. RUU tersebut menjadi bukti kesadaran bersama bahwa kegiatan jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik sangat penting sehingga harus dilindungi. Selain itu, Thailand telah memberlakukan *the 2007 Press Registration Act* menggantikan *1941 Press Act* yang banyak berisi pembatasan.

Catatan kedua: Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Kerajaan Thailand pada tahun 2007 dicantumkan jaminan terhadap kemerdekaan pers (Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48). Jaminan itu diperoleh melalui perjuangan masyarakat pers Thailand.¹¹

"Kode etik of the press, itu sangat dijaga, dari situ kita akhirnya mencapai titik temu. Anda boleh bebas tapi harus patuh pada kode etik," ungkap dia.

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam situasi konflik dan kekerasan yang muncul dari debab perbedaan identitas, agama, antara minoritas dan mayoritas yang akhirnya menjadi konflik yang tidak bisa ditemukan titik usainya. Dalam kaitan ini media sangat penting terhadap isu konflik, khususnya konflik Patani Thailand Selatan ini yang bertujuan untuk membangun perdamaian. Maka dari itu, peneliti dapat mengambil rumusan masalah yang akan diteliti pada **“Framing Konflik di Patani Thailand Selatan oleh Anggota Organisasi Jurnalis Wartawan Patani (WARTANI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat diambil beberapa pokok masalah:

¹¹ Dewan Pers, *Literasi Digital*, dalam <https://dewanpers.or.id/berita/detail/330/Dewan-Pers-Bertemu-Perdana-Menteri-Thailand>

1. Bagaimana Relevansi framing pemberitaan konflik di Patani (Thailand Selatan) oleh Jurnalis anggota Wartani?
2. Bagaimana peran Wartani dalam pemberitaan isu konflik di Patani (Thailand Selatan)?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambatan dalam melaksanakan pemberitaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan relevansi framing pemberitaan komunikasi di Patani (Thailand Selatan) oleh Jurnalis anggota Wartani.
2. Mengetahui peran Wartani dalam pemberitaan isu konflik di Patani (Thailand Selatan).
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambatan dalam melaksanakan pemberitaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian di atas, maka manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis.

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan menambah wawasan bagi pembaca tentang Perang Wartawan Patani (WARTANI) dalam Pemberitaan Isu Konflik di Patani Thailand Selatan

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan secara praktis akan bermanfaat dalam memberikan tambahan wawasan dan kontribusi wacana kepada pemberita isu konflik di Patani (Thailand Selatan). Selain itu agar dapat menambah pengetahuan kita serta memberikan motivasi untuk berpikir secara kritis dan analitis dalam menghadapi musibah yang terjadi.

E. Batasan Masalah

Berita Konflik Patani, agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang ada, maka permasalahan ini akan dibatasi pada:

1. Ada beberapa suku tema pemberitaan yang diangkat?
2. Adakah teori framing pemberitaan pembeding? Berger dan Luckmann, Shoemaker dan Reese.
3. Batasan sudut pandang tokoh wacana.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, penelien mencatatkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi yang hendak dilakukan.

1: Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul	Isi	Perbedaan
Marwan Yotha	2019	Peran Radio Media Selatan Dalam Proses Perdamaia n Konflik di Patani Thailand Selatan	Penelitian ini bertujuan menjelaskan peran radio komunitas Media Selatan dalam proses perdamaian-konflik di Patani Thailand Selatan dan paktur-faktur apa saja yang menjadi pendukung dan penghambatan dalam melaksanakan perannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran radio komunitas Media Selatan dalam proses perdamaian-konflik di Patani Thailand Selatan telah dilaksanakan dengan baik, melalui program	Penelitian berfokus kepada peran radio komunitas Media Selatan dalam proses perdamaian-konflik di Patani Thailand Selatan. Sedangkan penelitian ini lebih fokuskan freaming pemberitaan lembaga media untuk kedamain di

			acara <i>talkshow</i> dan diskusi bersama pendengar, menyampaikan informasi seputar isu perdamaian dan edukasi, menciptakan <i>area central</i> sebagai tempat bersuara, <i>safety voice</i> dan lain-lainnya.	Patani.
Husasan Tayeh	2020	Peran Watawan Patani (Wartani) Dalam Resolusi Konflik Di Patani (Thailand Selatan)	Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat menjadikan masyarakat dunia telah bergerak dan beralih dari era tradisional, industrialisasi ke era informasi yang berujung pada hadirnya masyarakat informasi (<i>information society</i>). Media massa jugak tidak kalah penting memiliki peran besar dalam mengembangan dan menyebarkan wacana dan peristiwa internasional. Disini peran media alternatif menjadi peran yang sangat penting untuk memberikan informasi	Penelitian berfokus kepada peran lembaga wartani dalam resolusi konflik di patani secara umum. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik fokuskan hanya freaming pemberitaan yang dilakukan oleh lembaga wartani.

			yang detil dan akurat mengenai apa yang terjadi di Patani (Thailand Selatan)	
Faisol Mamang	2017	Penelitian thisis judul “Peran <i>Civil Society</i> Organizational Dalam Proses Perdamaian di Patani”	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor dan usaha titik temu serta penyelesaian konflik baik yang dilakukan oleh prorangan maupun kelompok di dalam masyarakat Melayu Patani. Dengan kata lain, penelitian ini membahas dan menelusri jawaban dan pertanyaan bagaimana peran kelompok masyarakat sipil (<i>civil society</i>) Melayu-Muslim dalam melakukan usaha untuk membangunkan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik di Patani Thailand selatan.	Penelitian Peran <i>Civil Society</i> Organizations dalam proses perdamaian di Patani ini membahas dan menelusri jawaban dan pertanyaan bagaimana peran kelompok masyarakat sipil secara umum, sedangkan penelitian ini lebih focus kepada lembaga media secara spesifik.
Ahmad Suaedy, MA.	2012	Dinamika Muslim Mencari	Penelitian ini membahas masyarakat Muslim di Thailand Selatan (Patani)	Penelitian ini membahas tentang

		<p>Jalan Damai: Peran <i>Covil Society</i> Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan.</p>	<p>dan Filipina Selatan (Mindanao) dalam mencari jalan damai dari konflik berkepanjangan dengan pemerintah dan mayoritas di Negara tersebut. Walaupun separatisme masih ada, namun upaya negosiasi terus dilakukan oleh masyarakat sipil ini. Ciri-ciri mereka adalah bersifat netral, mengambil jarak dengan separatis, namun tidak menutus komunikasi menjadi representasi dalam upaya perdamaian dengan pemerintah. Penelitian ini jugak menunjukkan bahwa berbagai organisasi <i>civil society</i> di kedua wilayah Muslim itu cenderung mengambil jarak atau bersikap imparsial dari kelompok-kelompok politik yang terpolarisasi antara kelompok yang mengutamakan integrasi. Namun demikian,</p>	<p>masyarakat Muslim di Patani Thailand selatan dan Filipina Selatan (Mindanao), Penelitian ini jugak menunjukkan bahwa berbagai organisasi <i>civil society</i> di kedua wilayah Muslim itu cenderung mengambil jarak atau bersikap imparsial dari kelompok-kelompok.</p>
--	--	---	---	--

			organisa-organisasi itu tetap membawa aspirasi yang bersifat substantif, seperti aspirasi pengelolaan sendiri sumber daya alam dan usaha membangun pemeritahan sendiri(<i>self-government</i>). Penguatan <i>civil society</i> dalam resolusi konflik itu berjalan seiring dengan proses globalisasi, yang pada gilirannya menunjukkan fenomena yang paradoks.	
Don Pathan	2012	<i>Conflict management and Resolution in Asia: The Role of Civil Societies in Thailand's Deep South.</i>	Penelitian ini membahas tentang manajemen konflik di Asia dengan focus kajian peran <i>civil society</i> di Thailand Selatan yang mendapat dukungan bantuan dana dari <i>The Asia Foundation</i> dengan tulisan membahasakan kelompok persejataan bagi gerakan pembebasan. Namun pada waktu itu tidak begitu banyak CSOs yang mengambil peran atas	Penelitian ini berfokus kepada Patani Raya untuk kedamaian dan pembangunan (Lempar) dan meneliti dengan bertujuan mengetahui peran dari lembaga tersebutserta partisipasi

		<p>sikap bertanggung jawab oleh karena kondisi sewaktu itu mungkin tidak aman pada semua daerah semakin menjadi zona konflik seluruhnya malah menambah undang-undang istimewa yang dikeluarkan oleh pemeritahan pusat ata kestabilan Negara.</p> <p>Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini jelas lebih spesifik atau khusus pada satu subyek yakni Lembaga Patani Raya Untuk Kedamaian dan Pembangunan (Lempar) dan meneliti dengan bertujuan mengetahui peran dari lembaga tersebut serta partisipasi <i>civil society</i> dalam proses perdamaian konflik di daerah tersebut.</p>	<p><i>civil society</i> dalam proses perdamaian konflik di daerah tersebut.</p>
--	--	---	---

G. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Menurut *Jan Richhie* memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia social, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹²

Dari pengertian penelitian kualitatif di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

1. Paradikma Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dan informasi tentang apa yang mereka lakukan, data yang mereka alami terhadap fokus penelitian.¹⁴

- a. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak.
- b. Ciri penelitian kualitatif adalah membahas sebuah fenomenal secara mendalam.
- c. Metode penelitian Framing dapat membantu peneliti untuk menganalisis masalah.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berjudul Framing konflik di Patani (Thailand Selatan) oleh anggota organisasi Jurnalis wartawan Patani adalah pemberitaan media atau pemberitaan yang dilakukan oleh wartani.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemberitaan konflik pada Wartani selama awal 2020.

¹² Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya. 2018), h. 5.

¹³ Ahmad Tanzih, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 5.

¹⁴ Noeng Muhajir. *Metodologi Keilmuan: Pradikma kualitatif, Kualitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Rake Sarasian. 2007). 136

4. Teknik Pengupulan Data

a. Pengambilan data

Teknik pengupulan data adalah Saya memilih pemberitaan selama awal tahun 2020, awal tahun 2020 itu rentangannya antara bulan January, Fabuary dan Maret, pemberitaan yang dilakukan oleh Wartani, Saya ambil 5 berita yang mengandung pemberitaan konflik.

b. Wawancara mendalam

Bahwa saya akan melakukan wawancara mendalam kepada anggota Wartani.

5. Teknik Analisa Data

Data penelitian akan dianalisis menggunakan metode Framing Robert N. Entman dengan menggunakan 4 tahapan:

a. Define problems

Define problems adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing, yang merupakan *master frame* paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan, ketika ada masalah atau peristiwa.

b. Diagnose causes

Diagnose causes merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor utama suatu peristiwa. Penyebab disini bias berarti apa (*what*), tetapi bias juga berarti siapa (*who*).

c. Make moral judgement

Make moral judgement adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Gagasan yang dikutip berhubung dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

d. Treatment brecommendation

Treatment brecommendation elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung

pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

6. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dengan triangulasi data, data yang di triangulasi adalah hasil wawancara dengan hasil penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan adalah dengan menggunakan hasil analisis Framing Robert N. Entman dengan hasil wawancara.

8. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dilakukan secara deskriptif.